

BAB V

PENUTUP

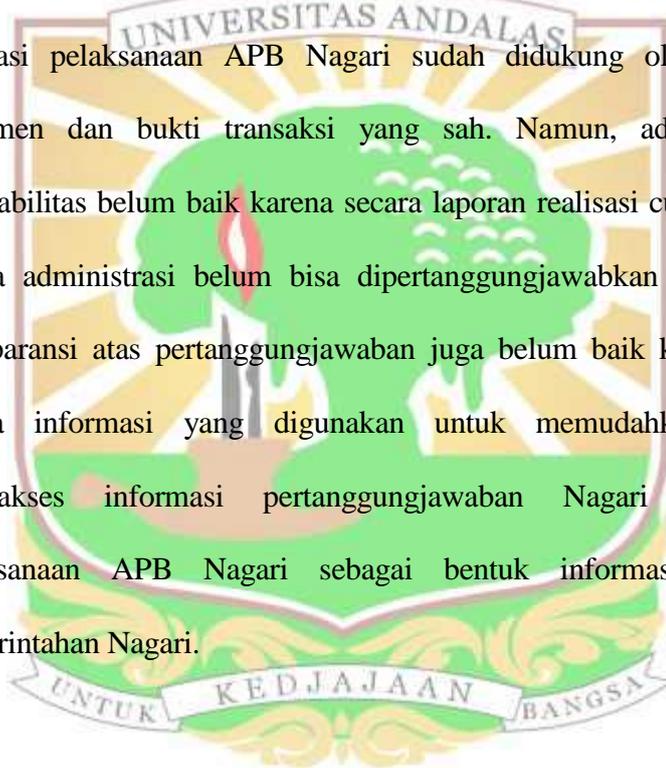
5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari pada tahap perencanaan menunjukkan akuntabilitas yang belum baik. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, rendahnya transparansi dan rendahnya pemahaman tentang pedoman perencanaan keuangan Nagari.
2. Analisis akuntabilitas pelaksanaan menunjukkan ada Nagari yang akuntabilitas sudah baik karena sudah berpedoman pada peraturan pelaksanaan keuangan Nagari. Namun, ada Nagari yang akuntabilitas belum baik disebabkan belum melaksanakan realisasi APB Nagari sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan Nagari.
3. Analisis akuntabilitas penatausahaan menunjukkan ada Nagari yang akuntabilitas sudah baik, dimana penatausahaan keuangan Nagari dilakukan sesuai dengan pedoman petunjuk teknis. Namun, ada Nagari yang akuntabilitas belum baik karena tidak satupun dokumen

penatausahaan yang selesai dibuat serta bukti transaksi pembayaran yang belum lengkap.

4. Analisis akuntabilitas atas pelaporan menunjukkan akuntabilitas yang belum baik karena tidak ada Nagari yang menyusun dan menyampaikan laporan tepat waktu.
5. Analisis akuntabilitas atas pertanggungjawaban menunjukkan ada Nagari yang akuntabilitas sudah baik, dimana laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan APB Nagari sudah didukung oleh kelengkapan dokumen dan bukti transaksi yang sah. Namun, ada Nagari yang akuntabilitas belum baik karena secara laporan realisasi cukup baik, tetapi secara administrasi belum bisa dipertanggungjawabkan Nagari. Bentuk transparansi atas pertanggungjawaban juga belum baik karena tidak ada media informasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pertanggungjawaban Nagari atas realisasi pelaksanaan APB Nagari sebagai bentuk informasi atas kinerja Pemerintahan Nagari.



5.2 Saran

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, maka disarankan beberapa hal berikut ini :

1. Perencanaan keuangan Nagari perlu berpedoman pada perencanaan pembangunan Nagari yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Agar lebih sempurnanya dalam pelaksanaan realisasi APB Nagari, Pemerintahan Nagari perlu mengikuti peraturan dan pedoman petunjuk teknis pengelolaan keuangan Nagari.
3. Perlu aplikasi akuntansi keuangan daerah untuk memudahkan pengelolaan keuangan Nagari.
4. Perlu media informasi bagi Nagari untuk mewujudkan transparansi keuangan Nagari agar dapat diawasi oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan/umpan balik masyarakat atas Keuangan Nagari.

5.3 Implikasi

Dari penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman perlu ada pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu pembinaan SDM pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan Nagari.
 - a. Pihak pelaksana keuangan Nagari, karena itu pemahaman prinsip partisipatif, akuntabilitas dan transparansi, harus dilakukan seefektif mungkin kepada pengelola keuangan Nagari guna meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari.
 - b. Pihak pengawasan, pembinaan dan fasilitasi keuangan Nagari seperti Bamus Nagari, Lembaga Nagari, Pihak Kecamatan dan Kabupaten.

2. Pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ).

